

## Jadwal SKD CPNS 17 Provinsi Sudah Diumumkan, Kemenag Maluku Sudah Mulai

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama telah mengumumkan jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (SPNS) tahun anggaran 2020. Total sudah ada 17 provinsi dari 21 provinsi yang jadwalnya sudah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kami targetkan jadwal dan lokasi SKD untuk 21 provinsi ini sudah diumumkan sebelum akhir Januari 2020," ujar M Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Selasa (28/01).

"Kami usahakan pengumuman tidak terlalu mepet dengan jadwal pelaksanaan, agar peserta dapat mempersiapkan diri dan tidak tergesa-gesa, khususnya yang ada di daerah yang jauh dari lokasi," sambungnya.

Sekjen kembali mengingatkan, saat pelaksanaan SKD CPNS Kemenag, peserta wajib membawa kartu peserta ujian, KTP asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan. Bagi peserta P1/TL harus mencetak ulang kartu ujian, sebab kartu ujian sebelumnya tidak berlaku. "Peserta juga wajib datang ke lokasi ujian 60 menit sebelum SKD dimulai," tegasnya.

Peserta juga harus mempersiapkan beberapa ketentuan pakaian sebagai berikut:

### **Pria:**

- Atasan kemeja putih polos
- Celana panjang berbahan kain warna gelap polos
- Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
- Menggunakan sepatu (rapi dan sopan)

### **Wanita:**

- Atasan kemeja putih polos
- Rok panjang/di bawah lutut (sopan) berbahan kain warna gelap polos
- Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
- Menggunakan sepatu (rapi dan sopan) bagi yang berkerudung warna gelap polos.

Berikut jadwal dan lokasi pelaksanaan tes SKD CPNS Kemenag di lima provinsi:

#### **A. Riau**

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di KANREG XII BKN PEKANBARU, pada 9 – 16 Februari 2020.

#### **B. Bali**

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di KANREG X BKN DENPASAR, pada 9 - 12 Februari 2020.

#### **C. Maluku Utara**

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN TERNATE, pada 10 – 16 Februari 2020.

#### **D. Papua**

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di KANREG IX BKN JAYAPURA, pada 10 – 12 Februari 2020.

#### **E. Papua Barat**

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN SORONG, pada 7 – 8 Februari 2020.



**SKD CPNS Maluku**

SKD CPNS Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku mulai berjalan sejak 27 Januari 2020. Tahapan ini berlangsung di UPT BKN Ambon, dan diikuti oleh ratusan pelamar seleksi CPNS. Tes SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Tes seleksi SKD terbagi dalam lima sesi, tiap sesi diikuti 100 peserta. Untuk sesi pertama tes SKD berlangsung pukul 08.00 - 09.30 WIT, sesi kedua pukul 10.00 - 11.30 WIT, sesi ketiga pukul 12.30 - 14.00 WIT, sesi keempat 14.30 - 16.00 WIT dan sesi kelima pukul 16.30 - 18.00 WIT.

Plt Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku Jamaludin Bugis menjelaskan pelaksanaan tes CPNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri (PNS) Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019.

"Pelaksanaan tes SKD ini dilakukan setelah saudara-saudari lolos tahapan administrasi. Setelah lolos tahapan seleksi SKD, dilanjutkan dengan tes seleksi SKB," kata Jamaludin.

"Saya berharap pelaksanaan CPNS menghasilkan calon PNS yang berkualitas, untuk membawa aparatur negara ini menuju birokrasi yang baik," sambungnya.

Koordinator tes CPNS CAT UPT BKN Ambon Abd Kaneng berharap pelaksanaan tes SKD CPNS berjalan baik. Ia memastikan pelaksanaan tes tetap mengedepankan prinsip akuntalibitas dan transparansi.

Untuk diketahui, peserta tes SKD CPNS Kemenag Provinsi Maluku berjumlah 2.293 pelamar. Ribuan peserta ini akan mengikuti tes SKD dari 27 – 31 Januari 2020.

Sementara nilai ambang batas SKD CPNS 2019 minimal yang harus dipenuhi antara lain, 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 24 Tahun 2019, yakni Pasal Pasal 3 Permenpan 24/2019.

Sumber : -

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512650/jadwal-skd-cpns-17-provinsi-sudah-diumumkan--kemenag-maluku-sudah-mulai>





## Siswa MAN IC Batam Raih Juara 1 Olimpiade Halal LPPOM MUI 2019

Batam (Kemenag) --- Aanisah Hani Sharfina, siswa kelas XI IIS 2 Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Kota Batam, berhasil merai Juara I Olimpiade Halal tahun 2019. Hal ini disampaikan Kepala MAN IC Batam Rudianto usai mendapatkan kabar kemenangan Aanisah melalui website dan instagram, pada Senin (27/01).

Menurut Rudianti, pada olimpiade yang digelar oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, Aanisah berhasil menyisihkan 19.698 peserta yang berasal dari 28 provinsi se-Indonesia dan lima negara lainnya, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Pakistan.

“Ya, alhamdulillah siswa kami atas nama Aanisah Hani Sharfina telah berhasil meraih juara 1 Olimpiade Halal LPPOM MUI Tahun 2019 yang diumumkan oleh ketua dewan juri Prof. Dr. Dra. Purwantiningsih, MS melalui website dan instagram pada Senin 27 Januari 2020,” ujar Rudianto.

Ia menambahkan, atas kemenangannya ini, Aanisa berhak mendapatkan hadiah umrah dan tabungan pendidikan sebesar 10 juta rupiah. Rudianto menuturkan, Aanisah Hani Sharfina berhasil meraih juara I Olimpiade Halal 2019 setelah melewati sejumlah rangkaian tes.

“Pertama ia harus mengikuti babak penyisihan dengan berbagai test tertulis secara online yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI,” tutur Rudianto.

Setelah melewati tahap tersebut, Aanisah pun terpilih sebagai 100 peserta terbaik dan masuk ke babak final. Dibabak ini Ia dihadapkan pada pembuatan vlog dengan tema : “Produk Halal Pilihan Generasi Millennial”.

“Dalam tahapan ini, Ia terpilih sebagai 6 peserta terbaik dan berhak masuk ke babak terakhir yakni grand final. Disini, Ia harus mempersentasikan hasil vlog buataannya melalui teleconference dan tanya jawab sekitar vlog dan wawasan halal,” sambung Rudianto.

Berdasarkan pengumuman yang diunggah LPPOM MUI, berikut nama pemenang Olimpiade Halal MUI 2019:

1. Juara 1 Aannisah Hani Sharfina, MAN IC Kota Batam Provinsi Kepri;
2. Juara 2 Putra Rizky Wahyu Setyawan, SMAN 7 Denpasar Provinsi Bali;
3. Juara 3 Rakean Radya Al Barra, SMAN 5 Bandung Provinsi Jawa Barat;
4. Harapan 1 Wildan Fauzy Maulana Hasyim, SMA PU Al Bayyan Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
5. Harapan 2 Bella Aprillianti, SMAN 1 Manggar Provinsi Bangka Belitung; dan
6. Harapan 3 Indira Audreyana Mahsa, Sekolah Indonesia Bangkok Thailand. (bad70/yd)

Sumber : MAN IC Batam

Penulis : Kontri

Editor : Indah Limy

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512647/kemenag-akan-bentuk-tim-audit-khusus--selesaikan-persoalan-rs-haji-jakarta>





## **Presiden Apresiasi Capaian Besar MK Sepanjang 2019**

Jakarta (Kemenag) --- Bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Fachrul Razi hari ini menghadiri Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019.

Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan MK ini digelar di ruang Sidang MK, Gedung MK di bilangan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/01). Tampak hadir para pimpinan lembaga negara, duta besar dan kepala perwakilan negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara non kementerian dan para rektor.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian besar MK sepanjang tahun 2019.

"Atas nama negara dan rakyat Indonesia saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pencapaian besar MK selama 2019 khususnya dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres dan Pileg melalui proses yang sangat transparan dan menghasilkan demokrasi yang dipercaya oleh masyarakat," kata Joko Widodo.

"Saya juga mengapresiasi keberhasilan dan peran aktif MK dalam forum internasional sehingga MK semakin disegani, dihormati dan bermartabat di mata dunia," sambung Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan tantangan dan peluang bangsa ke depan. Dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan tantangan semakin kompleks. Persaingan pun semakin ketat.

"Kita harus membangun cara-cara kerja baru yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Langkah kita juga harus cepat dan lebih dinamis. Kita harus melakukan penyederhanaan. Kita wajib memangkas kerumitan-kerumitan agar kita menjadi bangsa yang memiliki daya saing di tingkat dunia," ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengajak rakyat Indonesia untuk menyukuri apa yang telah dilakukan oleh pendiri bangsa dengan merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang tak mudah lekang oleh zaman. "Akan tetapi kita sering membuat peraturan turunan yang terlalu banyak, tidak konsisten dan mengekang ruang gerak serta menghambat langkah kita. Peraturan turunan ini juga mempersulit kita dalam memenangkan kompetisi," tandas Presiden.

Jokowi menekankan, pemerintah bersama DPR terus berupaya untuk mengembangkan sistem hukum yang kondusif yakni dengan mensikronkan berbagai UU melalui satu UU saja yakni omnibus law. UU seperti Omnibus law memang belum populer di Indonesia, tapi telah banyak diterapkan di Amerika Serikat dan Filipina.

"Ini adalah strategi reformasi regulasi harapannya hukum jauh lebih sederhana dan cepat menghadapi era perubahan yang sedang terjadi. Kita juga akan memangkas regulasi lain yang jumlahnya sangat banyak," tutur Jokowi.

Saat ini lanjut Jokowi terdapat 4.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Bangsa pun mengalami hiper regulasi sehingga terjerat oleh aturan yang dibuat sendiri. Peraturan ini harus disederhanakan agar bangsa bisa melangkah lebih cepat dalam merespon perubahan dunia.

"Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama pemerintah berada dalam satu visi yang sama, visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.

Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019 dipimpin Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri seluruh anggota MK.

Anwar Usman menyatakan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus termasuk dalam pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512652/presiden-apresiasi-capaian-besar-mk-sepaniang-2019-->



## **Indonesia Tuan Rumah Muktamar Toleransi dan Moderasi Beragama**

Jakarta (Kemenag) --- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi hari ini menerima perwakilan Kerajaan Arab Saudi (KSA) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan membahas rencana muktamar toleransi dan moderasi beragama yang rencananya akan digelar di Jakarta, Maret 2020.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut pembicaraan antara Menteri Agama Fachrul Razi dengan Dubes Arab Saudi pada 18 Desember 2019. Menurut Zainut, Kementerian Agama merasa mendapatkan kehormatan dipercaya menjadi tuan rumah untuk kali pertama gelaran Muktamar Toleransi dan Moderasi Beragama. "Kami seluruh jajaran Kemenag sudah siap melaksanakan amanah yang diberikan dari Kementerian Arab Saudi ini," ujar Wamenag di Jakarta, Selasa (28/01).

Kemenag, kata Zainut, menyambut baik penyelenggaraan Muktamar Toleransi dan Moderasi Beragama. Tujuannya, membangun kerjasama dalam mengembangkan Islam Wasyatiyah, Islam yang penuh kedamaian, menolak Islam yang tatharruf atau intoleran. Selain di Indonesia, muktamar ini juga pernah diselenggarakan di negara-negara lain.

"Kami akan siapkan sebaik mungkin, dan menyampaikan rencana kegiatan ini kepada Presiden dan Wakil Presiden, semoga beliau-beliau berkenan hadir dalam acara," ucap Zainut.

Sebelumnya, Wakil Dubes Arab Saudi Yahya Hasan N. Alqahtani menyampaikan salam dari Menteri Dakwah Arab Saudi kepada Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama. Yahya Hasan hadir bersama panitia inti muktamar, antara lain: Kepala Kantor Dirjen Urusan Agama Islam, KSA, Sheikh Mohammed Alotaibi, Atase Agama Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Sheikh Ahmed Alhazmi, Kepala bagian Urusan Islam, Kedubes Arab Saudi di Jakarta Abdurrahman Jomah.

Dikatakan Yahya Hasan, hubungan bilateral Arab Saudi-Indonesia sudah berjalan baik sangat lama, dari berbagai segmen utamanya urusan keagamaan. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga mempunyai pandangan yang sama tentang keagamaan, khususnya toleransi dan moderasi beragama. Oleh Karena itu, pemerintah Arab Saudi ingin menjadikan negara Indonesia menjadi tuan rumah untuk konferensi toleransi dan moderasi beragama.

"Konsepsi ukhwh islamiyah ini sangat erat hubungannya dengan toleransi dan moderasi beragama. Hal ini akan menjauhkan kita dari pandangan intoleransi dan tatharruf (ekstrem)," kata Yahya Hasan N. Alqahtani.

Penasihat Menteri Agama, Da'wah dan Bimbingan, KSA Faiz Alharbi juga menyampaikan rasa senangnya bisa berada di Indonesia. Menurutnya, suasana di Indonesia sangat aman dan tenang. "Suasana di sini sangat menyenangkan ketika ada kumandang adzan, masyarakat Indonesia berbondong-bondong ke masjid," kata Sheikh Faiz.

Sheikh Faiz berharap negara Indonesia senantiasa mendapatkan ketenangan, dan masyarakat di Saudi bersedia memberikan ketenangan. Saudi sangat sedih jika di Indonesia terganggu ketenangan dan kedamaiannya.

Disampaikan Faiz, muktamar ini adalah arahan dari kerajaan Arab Saudi untuk memperkuat hubungan kedua negara. Ini juga realisasi dari MoU kedua negara dalam memerangi intoleransi.

"Kemenag adalah lembaga atau institusi yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kami berharap acara dihadiri oleh salah seorang imam masjidil haram, insya Allah. Arahan raja langsung dan mengimami shalat di Indonesia. Muktamar akan dilaksanakan pada pertengahan Maret 2020," kata Sheikh Faiz.

Sumber : -

Penulis : M Arif Efendi

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512653/indonesia-tuan-rumah-muktamar-toleransi-dan-moderasi-beragama>



**Gelar Rakor Evaluasi, Kabalitbang Nilai Trust Kelembagaan Meningkat**

Bogor (Kemenag) --- Badan Litbang dan Diklat Kemenag menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2019 Dan Pemanjapan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 di Bogor. Kepala Balitbang-Diklat Abd Rahman Mas'ud mengapresiasi capaian kinerja jajarannya di tahun 2019.

Menurutnya, salah satu capaian itu terlihat dari adanya trust (kepercayaan) yang semakin meningkat. Kepercayaan itu antara lain datang dari sesama instansi pemerintah, lembaga lain, juga media lokal maupun internasional yang mulai menghubungi Balitbang Diklat. Banyak di antara mereka yang berkorespondensi untuk mendalami dan menindaklanjuti temuan penelitian Balitbang.

"Trust meningkat, baik dari instansi pemerintah, lembaga swasta, juga media," terang Abd Rahman di Bogor, Senin (27/01).

"Dari sisi image kelembagaan, terutama relasi keluar, sudah dibuktikan dengan beberapa akreditasi dan kerjasama dengan lembaga lain. Selain itu, kita pun sudah menerbitkan PMA Nomor 18 Tahun 2019 sebagai payung hukum kegiatan penelitian," sambungnya.

Di hadapan jajarannya, Abd. Rahman Mas'ud mengingatkan tantangan ke depan yang semakin kompleks. Karenanya, dia minta jajarannya untuk menghargai waktu dan amanah yang diberikan negara.

"We act without thinking, we keep thinking without acting. Ini adalah refleksi masalah umum birokrasi yang sering kita hadapi. Maka kita perlu menghargai waktu dan amanah yang diberikan oleh negara dengan cara memaksimalkannya," katanya.

Apalagi, tahun 2020 merupakan tahun transisi, di mana beberapa pejabat Eselon I dan II memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, perlu ada kesinambungan agar kinerja semakin baik.

Menutup sambutannya, Kabalitbang menggarisbawahi pentingnya lesson learned untuk terus dikembangkan. Ia pun mengajak seluruh peserta untuk terus bersyukur atas capaian yang berhasil diraih.

Pada kesempatan itu, diberikan penghargaan kepada unit Eselon II di lingkungan Badan Litbang dan Diklat atas serapan anggaran tertinggi tahun 2019.

Peringkat pertama diraih oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan nilai serapan 99.56%.

Peringkat kedua diraih oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dengan nilai serapan 98.60%.

Peringkat ketiga diraih oleh Sekretariat Badan Litbang dan Diklat dengan nilai serapan 97.87%.

Piagam Penghargaan Unit Eselon II Terbaik di Bidang Pelaporan Program dan Anggaran Tahun 2019 diberikan Kepada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan DIPA Tahun 2020 kepada masing-masing unit Eselon II. (diad/diad)

Sumber : -

Penulis : Dewi Indah Ayu

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512654/gelar-rakor-evaluasi--kabalitbang-nilai-trust-kelembagaan-meningkat>



## **Kemenag dan KPK Perkuat Fungsi Pencegahan Korupsi**

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk memperkuat fungsi pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi usai bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

"Sore ini kami mendapatkan kehormatan dikunjungi Ketua KPK beserta jajaran Beliau, dan sangat banyak memberikan masukan kepada jajaran Kementerian Agama," tukas Menteri Agama Fachrul Razi saat ditemui usai melakukan pertemuan, Selasa (28/01) sore.

"Tentu saja sesuai dengan fungsi pencegahan, mereka (KPK) memberikan masukan ke kita (Kemenag), apa langkah-langkah yang baik di lakukan untuk mencegah korupsi," sambung Menag.

Selain Firli, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 60 menit ini juga dihadiri oleh empat pimpinan KPK lainnya, yaitu: Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pamulango, dan Alexander Marwata. Hadir pula Sekjen dan Juru Bicara KPK.

"Tadi jajaran Kementerian Agama relatif lengkap. Jadi ini bisa diserap oleh semua teman-teman, dan ini bisa dikembangkan ke bawah. Saya sependapat sekali dengan masukan-masukan itu," terang Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan Sekjen Kemenag M.Nur Kholis Setiawan.

Menag Fachrul menegaskan masukan-masukan yang diberikan KPK memperkuat tekad Kementerian Agama dalam pencegahan korupsi.

"Kami juga memiliki tekad yang sama, tapi dengan masukan-masukan KPK tentu bisa bekerja dengan lebih baik dalam upaya bekerja sebaik-baiknya, tanpa melakukan korupsi," tandas Menag.

Sementara Firli Bahuri lmenjelaskan, Kementerian Agama adalah kementerian/lembaga ke-12 yang disambangi KPK dalam masa kepemimpinannya.

"Ini dalam rangka, kesatu, memberikan dukungan, semangat supaya melakukan upaya-upaya, program-program untuk pencegahan korupsi, itu yang pertama," jelas Firli.

Menurut Firli, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, sementara penindakan itu urusan KPK dan para penegak hukum. "Ini semangat kita. Semangat kita kan untuk bisa melakukan pencegahan," tuturnya.

Hal kedua, lanjut Firli, dalam rangka penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Juga membuka layanan agar orang berani melapor apabila ada dugaan korupsi. "Ketiga ingin memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa itu berjalan dengan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Firli pun mengapresiasi semangat Kemenag untuk melakukan pemberantasan korupsi. "Pak Menteri sudah berkomitmen untuk mencegah supaya tidak ada korupsi. Kalau masih ada, kita (KPK) lakukan penegakkan hukum," tegasnya.

Sumber : -

Penulis : Indah Limy

Editor : Indah Limy

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512655/kemenag-dan-kpk-perkuat-fungsi-pencegahan-korupsi>



## Bertemu Menag, Ketua KPK Beri Peringatan Dini Bahaya Laten Korupsi

**Merdeka.com** - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berkunjung ke Kantor Kementerian Agama di Jakarta Pusat, Selasa (28/1). Dalam kunjungan yang berlangsung secara tertutup ini, Firli memberi peringatan dini guna mencegah potensi korupsi di Kementerian Agama.

"Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama, semangat kita adalah lebih baik melakukan pencegahan," kata Firli di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/1/2020).

Bila korupsi masih terjadi meski upaya peringatan dini sudah dilakukan, Firli mengaku tak segan menindak siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau masih ada, kita lakukan penegakan hukum," tegas dia.

Menanggapi peringatan dini ini, Menteri Agama Fachrul Razi menyambut baik. Menurutnya pengawasan di pihak internal kementerian sudah dijalanannya lewat tim direktorat jenderal.

Namun dia tidak menutup kemungkinan, bila jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat ikut mengawasi jalannya tata kelola kementeriannya agar benar-benar bersih dari tindak rasuah.

"Tentu dalam aspek pencegahan, pengawasan adalah fungsi manajemen. KPK juga melakukan fungsi pengawasan itu," singkat Menag.

### Jejak Korupsi di Kementerian Agama

Seperti diketahui, korupsi di jajaran kementerian agama kerap berulang. Masih lekat dalam ingatan bagaimana suap terjadi dalam kasus jual beli jabatan yang menyeret mantan Ketua Umum PKB Romahurmuziy atau Rommy dengan elite wilayah Kementerian Agama di Jawa Timur.

Sebelum itu, sempat pula terjadi korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2011-2013 serta penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) Suryadharma Ali. Atau kasus lain yang juga pernah terjadi di Kementerian Agama adalah kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada APBNP 2011 dan APBN 2012.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com

[noe]

Sumber : <https://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-menag-ketua-kpk-beri-peringatan-dini-bahaya-laten-korupsi.html>



## Tekan Angka Perceraian, Menag RI Dorong BP4 Rekrut Relawan

**TIMESINDONESIA, JAKARTA** – Menteri Agama RI (Menag RI), Fachrul Razi mengapresiasi peran dan fungsi penting Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di tanah air yang tiap tahun mengalami kenaikan.

Hal itu disampaikan Menag saat menerima kunjungan audiensi pengurus BP4 periode 2019-2024 di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). Dalam pertemuan itu, Menag menyarankan BP4 merekrut tenaga relawan untuk ditugaskan di Pengadilan Agama.

"Tugas mereka adalah menjemput bola dengan melakukan pendekatan kepada pasangan yang akan bercerai di Pengadilan Agama. Saya rasa upaya ini akan efektif dalam menurunkan angka perceraian," katanya.

Menag menyebut jika rekrutmen tenaga relawan bisa diambil dari para mahasiswa psikologi. "Mereka bisa sekalian magang di sana. Saya kira BP4 sudah banyak berbuat dan bekerja. Pendekatan milenial dan bersahabat juga harus dilakukan," sambungnya.

Menurut Menag, sebelum relawan diterjunkan di lapangan, mereka sedianya dibekali strategi komunikasi yang efektif dan familiar dari BP4 agar pasangan yang berselisih, sembari menunggu antrian sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama, bisa islah kembali.

Kepada segenap jajaran pengurus BP4 yang hadir dalam audiensi, Menag RI berpesan agar semua saran dan masukan dihimpun segera dalam rangka menjalin kerjasama dengan Kemenag RI. "Agar bisa ditindaklanjuti ke depannya, sebab manfaat dan keberadaan BP4 sangat baik dan mulia," ucap Fachrul Razi. (\*)

Sumber : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/248462/tekan-angka-perceraian-menag-ri-dorong-bp4-rekrut-relawan>





## Kemenag Siap Bentuk Tim Audit Khusus Tangani RS Haji Jakarta

**JAKARTA** - Kementerian Agama (Kemenag) akan membentuk tim audit khusus atau gabungan untuk melihat secara langsung kondisi Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta.

Audit akan dilakukan, baik untuk melihat kondisi fisik bangunan, keuangan dan lainnya yang terkait perkembangan RS Haji Jakarta sampai saat ini.

“Sejak dua setengah tahun, RS Haji Jakarta sudah banyak kemajuan. Namun sekarang yang menjadi masalah terkait keuangan,” tutur Direktur RS Haji Syarief saat bertemu Menag Fachrul Razi, di Jakarta, Senin 27 Januari 2020 seperti dikutip dari kemenag.go.id.

Syarief menjelaskan, saat ini RS Haji Jakarta membutuhkan anggaran sebesar Rp 42 miliar. Adapun yang menjadi prioritas adalah kebutuhan kewajiban pajak, obat-obatan, dan lainnya.

“Kami sudah membuat laporan keuangannya untuk dilaporkan ke Kementerian Agama,” katanya.

Dia menjelaskan keberadaan RS Haji Jakarta cukup prospektif dan potensial. Apalagi, saat ini ada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN Syarif Hidayatullah yang memiliki Fakultas Kedokteran dan PTKIN lainnya di Indonesia. Saat ini RS Haji memiliki 800 karyawan.

Sementara itu, Menag Fachrul Razi mengakui RS Haji Jakarta masih bisa dibuat lebih baik. Bahkan Menag mengaku pernah berbincang dengan Menteri Kesehatan terkait RS Haji Jakarta.

“Tim gabungan dari Itjen akan segera turun ke RS Haji Jakarta, untuk menyikapi langkah-langkah Kemenag ke depan. Kita tunggu laporan keuangan terkini dari RS Haji, agar bisa menetapkan langkah-langkah lebih lanjut,” ujar Menag.

(dam)

Sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/1509436/15/kemenag-siap-bentuk-tim-audit-khusus-tangani-rs-haji-jakarta-1580177891>

**SINDONEWS.com**  
Sumber Informasi Terpercaya

Home Politik Hukum Hankam Humaniora Edukasi Indeks

home > humaniora

**PHOTO**

Menko Perekonomian Hadiri Manager Forum XLIII MNC Group  
Menko Perekonomian Hadiri Manager Forum XLIII MNC Group

Ratusan Wisatawan Asal China Tinggalkan Batam  
Ratusan Wisatawan Asal China Tinggalkan

### Kemenag Siap Bentuk Tim Audit Khusus Tangani RS Haji Jakarta

Adam Prawira  
Selasa, 28 Januari 2020 - 09:18 WIB

**TERPOPULER**

- Mengintip Kekompakan Jokowi dan Prabowo dalam Kapal Selam Alugoro 405
- Virus Corona Sudah Level Dua, WNI di Wuhan Minta Dievakuasi
- Din Syamsuddin: Pancasila-UUD 1945 Tampilkan Prinsip Jalan Tengah Islam



## Bertemu Menteri Agama, KPK Peringatkan Potensi Korupsi di Kemenag

**Liputan6.com, Jakarta** - Ketua KPK Firli Bahuri berkunjung ke Kantor Kementerian Agama. Dalam kunjungan yang berlangsung secara tertutup ini, Firli memberi peringatan dini guna mencegah potensi korupsi yang kerap terjadi di Kementerian Agama.

"Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama, semangat kita adalah lebih baik melakukan pencegahan," kata Firli di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/1/2020).

Menurut Firli, bila setelah upaya peringatan dini masih terjadi korupsi, maka bersama jajaran antirasuahnya dia tak akan segan menindak siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau masih ada, kita lakukan penegakan hukum," tegas dia.

Menanggapi peringatan dini ini, Menteri Agama Fachrul Razi menyambut baik. Menurutnya pengawasan di pihak internal kementerian sudah dijalanakannya lewat tim direktorat jenderal.

Namun ia tidak menutup kemungkinan, bila jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat ikut mengawasi jalannya tata kelola kementerannya agar benar-benar bersih dari tindak rasuah.

"Tentu dalam aspek pencegahan, pengawasan adalah fungsi manajemen. KPK juga melakukan fungsi pengawasan itu," jelas Menag menandasi.

### Korupsi yang Berulang

Seperti diketahui, korupsi di jajaran Kementerian Agama kerap berulang. Masih lekat dalam ingatan bagaimana suap terjadi dalam kasus jual beli jabatan yang menyeret politisi PKB Romahurmuziy atau Romi dengan elite wilayah Kementerian Agama di Jawa Timur.

Sebelum itu, sempat pula terjadi korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2011-2013 serta penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) oleh Menag Suryadharma Ali. Atau kasus lain yang juga pernah terjadi di Kementerian Agama dalam kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama pada APBNP 2011 dan APBN 2012.

Sumber : <https://www.liputan6.com/news/read/4166045/bertemu-menteri-agama-kpk-peringatkan-potensi-korupsi-di-kemenag>

The screenshot shows the article page on the Liputan6.com website. The main headline is "Bertemu Menteri Agama, KPK Peringatkan Potensi Korupsi di Kemenag". The author is listed as "Muhammad Rediyo Priyasmoro" with a timestamp of "28 Jan 2020, 19:54 WIB". Below the headline are social media sharing icons for Facebook, Twitter, and Google+, along with a "Share 15" button. To the right, there is a "TOPIK POPULER" section listing trending topics: #JIWASRAYA, #WAHYU SETIAWAN, #NATUNA, #GEMPA HARI INI, and #ENAM PLUS. The website's navigation menu includes categories like HOME, NEWS, BISNIS, SHOWBIZ, BOLA, FOTO, TEKNO, CEK FAKTA, VIDEO, HOT, DISABILITAS, GLOBAL, OTOMOTIF, and LAINNYA.



## Soal RS Haji Jakarta, Kemenag Akan Bentuk Tim Audit Khusus

daulat.co – Kementerian Agama dalam waktu dekat akan membentuk tim audit khusus atau gabungan untuk melihat secara langsung kondisi Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta. Audit akan dilakukan, baik untuk melihat kondisi fisik bangunan, keuangan dan lainnya yang terkait perkembangan RS Haji Jakarta sampai saat ini.

“Sejak dua setengah tahun, RS Haji Jakarta sudah banyak kemajuan. Namun sekarang yang menjadi masalah terkait keuangan,” kata Direktur RS Haji Syarief saat bertemu Menag Fachrul Razi, di ruang kerja jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4 Jakarta pusat, Senin (27/01).

Disampaikan Syarief, saat ini RS Haji Jakarta membutuhkan anggaran sebesar Rp 42 M, yang menjadi prioritas untuk kebutuhan kewajiban pajak, obat-obatan, dan lainnya. “Kami sudah membuat laporan keuangannya untuk dilaporkan ke Kementerian Agama,” tambah Syarief.

Diakui Syarief, keberadaan RS Haji Jakarta cukup prospektif dan potensial. Apalagi, saat ini ada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN Syarif Hidayatullah yang memiliki Fakultas Kedokteran dan PTKIN lainnya di Indonesia. Saat ini, RS Haji memiliki 800 karyawan.

Menag Fachrul Razi mengakui RS Haji Jakarta masih bisa dibuat lebih baik. Bahkan Menag sendiripun pernah berbincang dengan Menteri Kesehatan terkait RS Haji Jakarta.

“Tim gabungan dari Itjen akan segera turun ke RS Haji Jakarta, untuk menyikapi langkah-langkah Kemenag ke depan. Kita tunggu laporan keuangan terkini dari RS Haji, agar bisa menetapkan langkah-langkah lebih lanjut,” kata Menag.

Tampak hadir mendampingi Menag, Karo Perencanaan Ali Rokhmad, Karo Ortala Afrizal Zein, dan Karo Keuangan dan BMN M Ali Irfan.

Sumber : <http://daulat.co/soal-rs-haji-jakarta-kemenag-akan-bentuk-tim-audit-khusus/>





## Indonesia 'Host' Muktamar Toleransi dan Moderasi Beragama, Wamenag: Kami Siapkan Sebaik Mungkin

**Jakarta, Nusantaratv.com** - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menerima perwakilan Kerajaan Arab Saudi (KSA), di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Pertemuan tersebut membahas rencana muktamar toleransi dan moderasi beragama yang rencananya akan digelar di Jakarta, pada Maret 2020. Pertemuan ini sekaligus sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dengan Dubes Arab Saudi pada 18 Desember 2019.

Menurut Wamenag Zainut Tauhid, Kemenag merasa mendapatkan kehormatan dipercaya menjadi tuan rumah untuk kali pertama gelaran Muktamar Toleransi dan Moderasi Beragama.

"Kami seluruh jajaran Kemenag sudah siap melaksanakan amanah yang diberikan dari Kementerian Arab Saudi ini," ujar Wamenag Zainut Tauhid, di Jakarta, dilansir dari laman *kemenag.go.id*, Selasa (28/01).

Kemenag, kata Zainut, menyambut baik penyelenggaraan Muktamar Toleransi dan Moderasi Beragama. Tujuannya, membangun kerjasama dalam mengembangkan Islam Wasyatiyah, Islam yang penuh kedamaian, menolak Islam yang tatharruf atau intoleran. Selain di Indonesia, muktamar ini juga pernah diselenggarakan di negara-negara lain.

"Kami akan siapkan sebaik mungkin, dan menyampaikan rencana kegiatan ini kepada Presiden dan Wakil Presiden, semoga beliau-beliau berkenan hadir dalam acara," lanjutnya.

Disisi lain, Wakil Dubes Arab Saudi Yahya Hasan N. Alqahtani menyampaikan salam dari Menteri Dakwah Arab Saudi kepada Menag Fachrul Razi dan Wamenag Zainut Tauhid. Yahya Hasan hadir bersama panitia inti muktamar, yakni Kepala Kantor Dirjen Urusan Agama Islam, KSA, Sheikh Mohammed Alotaibi, Atase Agama Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Sheikh Ahmed Alhazmi, Kepala bagian Urusan Islam, Kedubes Arab Saudi di Jakarta Abdurrahman Jomah.

Dikatakan Yahya Hasan, hubungan bilateral Arab Saudi-Indonesia sudah berjalan baik sangat lama, dari berbagai segmen utamanya urusan keagamaan. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga mempunyai pandangan yang sama tentang keagamaan, khususnya toleransi dan moderasi beragama. Oleh Karena itu, pemerintah Arab Saudi ingin menjadikan negara Indonesia menjadi tuan rumah untuk konferensi toleransi dan moderasi beragama.

"Konsepsi ukhwh islamiyah ini sangat erat hubungannya dengan toleransi dan moderasi beragama. Hal ini akan menjauhkan kita dari pandangan intoleransi dan tatharruf (ekstrem)," terang Yahya Hasan.

Penasihat Menteri Agama, Da'wah dan Bimbingan, KSA Faiz Alharbi juga menyampaikan rasa senangnya bisa berada di Indonesia. Menurutnya, suasana di Indonesia sangat aman dan tenang. "Suasana di sini sangat menyenangkan ketika ada kumandang adzan, masyarakat Indonesia berbondong-bondong ke masjid," tutur Sheikh Faiz.

Sheikh Faiz berharap negara Indonesia senantiasa mendapatkan ketenangan, dan masyarakat di Saudi bersedia memberikan ketenangan. Saudi sangat sedih jika di Indonesia terganggu ketenangan dan kedamaiannya.

Disampaikan Faiz, muktamar ini adalah arahan dari kerajaan Arab Saudi untuk memperkuat hubungan kedua negara. Ini juga realisasi dari MoU (Memorandum of Understanding) kedua negara dalam memerangi intoleransi.

"Kemenag adalah lembaga atau institusi yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kami berharap acara dihadiri oleh salah seorang imam masjidil haram, insya Allah. Arahan raja langsung dan mengimami shalat di Indonesia. Muktamar akan dilaksanakan pada pertengahan Maret 2020," tukas Sheikh Faiz.

Sumber : <https://nasional.nusantaratv.com/fokus/indonesia-host-muktamar-toleransi-dan-moderasi-beragama-wamenag-kami-siapkan-sebaik-mungkin>



## Wujudkan Sejuta Penghafal Alquran, RQV Jajaki Kerja Sama dengan Kemenag

**RUMAH** Quran Violet (RQV) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menjalankan Program Tahfidz Alquran. Program ini berupaya mewujudkan sejuta **penghafal Alquran**.

Pengurus RQV Indonesia sendiri sudah menemui Menag Fachrul Razi di kantornya. Hasilnya, mantan wakil panglima TNI tersebut menyambut baik tawaran kerja sama Program Tahfidz Alquran tersebut.

“Kita akan pelajari, sejauh mana program berbasis kemasyarakatan itu, bagaimana polanya. Saya setuju, mendalami Alquran itu bukan sekedar menghafal, tapi menghayati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag pada Selasa (28/1/2020).

Sementara itu Presiden RQV Sultan Mude Azmi F.U mengatakan bahwa RVQ merupakan lembaga nasional sosial keagamaan yang berfokus pada pendidikan tahfidzul quran berkarakter dan melahirkan masyarakat penghafal Alquran. Program yang mereka jalankan adalah gratis atau tanpa dipungut biaya dari peserta. “Menghafal Alquran secara gratis berbasis masyarakat,” ucapnya.

Sultan Mude menyampaikan bahwa RQV Indonesia saat ini sudah ada di beberapa kota besar di pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dalam waktu dekat, RQV juga akan bertemu dengan tokoh dan masyarakat Fakfak, Papua Barat, demi mewujudkan sejuta **penghadal Alquran**.

“Kami berharap generasi Indonesia paham dan cinta Alquran. Program RQV Indonesia semua berbasis kemasyarakatan,” kata Sultan Mude.

Sultan Mude berharap RQV Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan guru-guru Madrasah. RQV Indonesia memiliki target membentuk 1.000 kampung Alquran dan sejuta penghafal Alquran.

“Kami siap berkolaborasi dengan program-program Madrasah di Kemenag,” ucap Sultan Mude.

(abp)

Sumber : <https://muslim.okezone.com/read/2020/01/28/614/2159337/wujudkan-sejuta-penghafal-alquran-rqv-jajaki-kerja-sama-dengan-kemenag>

The screenshot shows a web browser displaying the article on the okemuslim website. The page layout includes a navigation bar with categories like 'HOME', 'SERBA SERBI MUSLIM', 'AL QURAN DIGITAL', 'DOA HARIAN', 'TIPS MUSLIM', 'JADWAL SHOLAT', 'TAUSYIAH', 'FOTO', 'VIDEO', and 'INDEKS'. The main content area features the article title and author information. A sidebar on the right contains a 'TERPOPULER' section with a list of six trending articles, each with a numbered icon and a brief title.



## Jika Masih Ada Korupsi di Kemenag, KPK Tak Segan Lakukan Penegakan Hukum

**JAKARTA** - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyambangi kantor Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (28/1/2020). Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut Menteri Agama Fachrul Razi dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid.

Usai melakukan pertemuan tertutup, Firlil menjelaskan tujuan pihaknya mendatangi Kemenag. Ia menyebut pertemuan itu membahas persoalan pencegahan korupsi di kementerian. Firlil mengaku tak segan-segan melakukan penegakan hukum, bila lembaga itu masih berani menyelewengkan uang negara.

"Ini semangat kita, semangat kita adalah lebih baik melakukan pencegahan. Pak Menteri (Agama) sudah komitmen segala upaya agar tak terjadi korupsi, kalau masih ada (korupsi) kita lakukan penegakan hukum," kata Firlil di lokasi.

Menurut dia, semangat pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama sehingga harus ada koordinasi antarlembaga negara.

"Karena pencegahan korupsi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Menag Fachrul Razi menyatakan pihaknya berkomitmen memerangi budaya korupsi di lingkungan kerjanya.

"Karena masukan itu menjadi pegangan kami bersama. Kami juga sudah punya tekad yang sama. Tapi dengan masukan KPK, akan membuat kami kerja lebih baik dalam upaya bekerja sebaik-baiknya, tanpa ada korupsi," kata Fachrul.

Menurut dia, masukan dari pimpinan lembaga antirasuah sangat berguna untuk menjalankan agenda kementerian tanpa adanya korupsi.

"Sangat manfaat untuk kami, apalagi tadi jajaran Kementerian Agama relatif lengkap jadi bisa diserap oleh semua teman-teman dan akan dikembangkan ke bawah," ucapnya.

(edi)

Sumber : <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/28/337/2159669/jika-masih-ada-korupsi-di-kemenag-kpk-tak-segan-lakukan-penegakan-hukum>

The screenshot shows the Okezone news website interface. At the top, there is a navigation bar with categories like HOME, NASIONAL, MEGAPOLITAN, INTERNATIONAL, NUSANTARA, KAMPUS, INFOGRAFIS, TOKOH, FOTO, VIDEO, and INDEKS. Below this, the article title "Jika Masih Ada Korupsi di Kemenag, KPK Tak Segan Lakukan Penegakan Hukum" is prominently displayed. The author is listed as "Fadel Prayoga, Jurnalis" and the date is "Selasa 28 Januari 2020 18:55 WIB". To the right of the article, there is a "TERPOPULER" section with a list of four trending news items: 1. 9 Perempuan Cantik yang Dipenjara karena Korupsi di Indonesia, 2. Presiden PKS Perintahkan Kadernya di DPR Cari Tahu Penyebab Ronny Somple Dicotot, 3. Polisi Tangkap Pelaku yang Tipu Putri Arab Rp512 Miliar di Bali, and 4. Soal Pencopotan Dirjen Imigrasi, Yasnina: Tanojono Jawabnya Sibaa. The main article content is partially visible at the bottom of the screenshot.



## **Setelah 12 Provinsi, Kini Kemenag Umumkan Jadwal SKD CPNS di 5 Provinsi, Termasuk Bali**

**Moeslimchoice.** Jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (SPNS) tahun anggaran 2020 telah diumumkan. Total sudah ada 17 provinsi dari 21 provinsi yang jadwalnya sudah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kami targetkan jadwal dan lokasi SKD untuk 21 provinsi ini sudah diumumkan sebelum akhir Januari 2020," ujar M Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Selasa (28/1).

"Kami usahakan pengumuman tidak terlalu mepet dengan jadwal pelaksanaan, agar peserta dapat mempersiapkan diri dan tidak tergesa-gesa, khususnya yang ada di daerah yang jauh dari lokasi," sambungnya.

Sekjen kembali mengingatkan, saat pelaksanaan SKD CPNS Kemenag, peserta wajib membawa kartu peserta ujian, KTP asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan. Bagi peserta P1/TL harus mencetak ulang kartu ujian, sebab kartu ujian sebelumnya tidak berlaku.

"Peserta juga wajib datang ke lokasi ujian 60 menit sebelum SKD dimulai," tegasnya.

Peserta juga harus mempersiapkan beberapa ketentuan pakaian sebagai berikut:

Pria:

- Atasan kemeja putih polos
- Celana panjang berbahan kain warna gelap polos
- Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
- Menggunakan sepatu (rapi dan sopan)

Wanita:

- Atasan kemeja putih polos
- Rok panjang/di bawah lutut (sopan) berbahan kain warna gelap polos
- Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
- Menggunakan sepatu (rapi dan sopan) bagi yang berkerudung warna gelap polos.

**Berikut jadwal dan lokasi pelaksanaan tes SKD CPNS Kemenag di lima provinsi:**

A. Riau

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di KANREG XII BKN PEKANBARU, pada 9 – 16 Februari 2020.

B. Bali

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di KANREG X BKN DENPASAR, pada 9 - 12 Februari 2020.

C. Maluku Utara

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN TERNATE, pada 10 – 16 Februari 2020.

D. Papua

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di KANREG IX BKN JAYAPURA, pada 10 – 12 Februari 2020.

E. Papua Barat

SKD CPNS Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku telah mulai dilakukan sejak 27 Januari 2020 kemarin. Tahapan ini berlangsung di UPT BKN Ambon, dan diikuti oleh ratusan pelamar seleksi CPNS. Tes SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).



Tes seleksi SKD terbagi dalam lima sesi, tiap sesi diikuti 100 peserta. Untuk sesi pertama tes SKD berlangsung pukul 08.00 - 09.30 WIT, sesi kedua pukul 10.00 - 11.30 WIT, sesi ketiga pukul 12.30 - 14.00 WIT, sesi keempat 14.30 - 16.00 WIT dan sesi kelima pukul 16.30 - 18.00 WIT.

Plt Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri (PNS) Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019.

"Pelaksanaan tes SKD ini dilakukan setelah saudara-saudari lolos tahapan administrasi. Setelah lolos tahapan seleksi SKD, dilanjutkan dengan tes seleksi SKB," kata Jamaludin.

"Saya berharap pelaksanaan CPNS menghasilkan calon PNS yang berkualitas, untuk membawa aparatur negara ini menuju birokrasi yang baik," sambungnya.

Koordinator tes CPNS CAT UPT BKN Ambon, Abd Kaneng berharap pelaksanaan tes SKD CPNS berjalan baik. Ia memastikan pelaksanaan tes tetap mengedepankan prinsip akuntalibitas dan transparansi.

Untuk diketahui, peserta tes SKD CPNS Kemenag Provinsi Maluku berjumlah 2.293 pelamar. Ribuan peserta ini akan mengikuti tes SKD dari 27 – 31 Januari 2020.

Sementara nilai ambang batas SKD CPNS 2019 minimal yang harus dipenuhi antara lain, 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 24 Tahun 2019, yakni Pasal Pasal 3 Permenpan 24/2019.

Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN SORONG, pada 7-8 Februari 2020. [mel]

Sumber : <https://www.moeslimchoice.com/read/2020/01/28/32202/setelah-12-provinsi-kini-kemenag-umumkan-jadwal-skd-cpns-di-5-provinsi-termasuk-bali>





## Pimpin Rapat Finalisasi, Sekjen Pastikan Kesiapan Rakernas Kemenag 2020

**Moeslimchoice.** Sekretaris Jenderal, M. Nur Kholis Setiawan memimpin langsung finalisasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2020, pada Senin (27/1).

Dalam rapat finalisasi yang dihadiri oleh panitia Rakernas Kemenag tahun 2020, Nur Kholis berharap agar Rakernas nantinya dapat menjadi acuan bagi rapat kerja di setiap wilayah (Rakerwil). Ia menitipkan pesan agar panitia membuat design template kegiatan raker yang dapat diadopsi oleh setiap kantor wilayah.

"Hal ini diperlukan agar fungsi vertikal kita bisa betul-betul berjalan, sehingga output dan outcome nya betul-betul bisa dihitung hasilnya di akhir tahun 2020," ujarnya.

Rakernas Kemenag tahun 2020 akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29-31 Januari 2020 mendatang dengan mengusung tema "Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju".

Pada Rakernas juga akan diberikan sejumlah penghargaan kepada unit-unit kerja dan individu yang dinilai memiliki prestasi, seperti Satuan Kerja Berpredikat WBK Tahun 2019, Pimpinan Satker Inspiratif Dan Inovatif, Duta Akrual Teladan, Duta BMN Teladan, Satuan Kerja Pengelola Website dan Jaringan Terbaik, serta Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik.

Sekjen menyambut baik pemberian penghargaan terhadap sejumlah unit kerja berprestasi.

"Ini penting, karena panggung Rakernas adalah panggung kita bersama," kata Sekjen

Rakernas akan diikuti oleh lebih dari 400 orang peserta, mulai dari Menteri Agama RI, Wakil Menteri, Pejabat Unit Eselon I Pusat, Staf Ahli/Khusus Menteri, Rektor UIN/IAIN/IHDN, Pejabat Unit Eselon II Pusat, Kepala Kanwil Kemenag, Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN, Kepala Balai dan Kankemenag Kota/Kab (DKI), Pimpinan Satker Penerima Penghargaan, Pejabat eselon III, IV dan JP (Pusat).

Kepala Biro Ortala, Afrizal Zen menghimbau kepada peserta agar memperhatikan ketentuan yang telah disampaikan panitia pada surat undangan, antara lain membawa surat tugas dari unit masing-masing, melakukan registrasi dan pengisian curriculum vitae secara online melalui link rakernas2020.kemenag.go.id.

Rakernas Kemenag 2020, juga dijadwalkan akan dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dewan Pengawas BPIP, Deputi BPIP, Sekretaris Utama BPIP, Anggota BPIP, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. [mel]

Sumber : <https://www.moeslimchoice.com/read/2020/01/28/32212/pimpin-rapat-finalisasi-sekjen-pastikan-kesiapan-rakernas-kemenag-2020>





## Usung Tema Moderasi Beragama, Kemenag Gelar Rakernas 2020 Besok

**gomuslim.co.id** – Kementerian Agama akan menggela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 29-31 Januari 2020 di Jakarta. Rakernas kali ini mengusung tema 'Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju'.

Sekretaris Jenderal Kemenag, M Nur Kholis Setiawan mengungkapkan kesiapan Rakernas tersebut saat memimpin langsung finalisasi Rakernas Kemenag Tahun 2020, Senin (27/01/2020) kemarin. Dalam rapat finalisasi yang dihadiri oleh jajaran panitia, Nur Kholis berharap agar Rakernas nantinya dapat menjadi acuan bagi rapat kerja di setiap wilayah (Rakerwil).

Ia pun berpesan agar panitia membuat *design template* kegiatan raker yang dapat diadopsi oleh setiap kantor wilayah. "Hal ini diperlukan agar fungsi vertikal kita bisa betul-betul berjalan, sehingga *output* dan *outcome* nya betul-betul bisa dihitung hasilnya di akhir tahun 2020," ujar Nur Kholis.

Pada kegiatan Rakernas besok, akan ada pemberian sejumlah penghargaan kepada unit-unit kerja dan individu yang dinilai memiliki prestasi seperti Satuan Kerja Berpredikat WBK Tahun 2019, Pimpinan Satker Inspiratif Dan Inovatif, Duta Akrual Teladan, Duta BMN Teladan, Satuan Kerja Pengelola Website dan Jaringan Terbaik, serta Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik.

Nur Kholis pun menyambut baik pemberian penghargaan terhadap sejumlah unit kerja berprestasi. "Ini penting (red-pemberian penghargaan), karena panggung Rakernas adalah panggung kita bersama," imbuhnya.

Rakernas 2020 rencananya akan diikuti oleh lebih dari 400 orang peserta mulai dari Menteri Agama RI, Wakil Menteri, Pejabat Unit Eselon I Pusat, Staf Ahli/Khusus Menteri, Rektor UIN/IAIN/IHDN, Pejabat Unit Eselon II Pusat, Kepala Kanwil Kemenag, Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN, Kepala Balai dan Kankemenag Kota/Kab (DKI), Pimpinan Satker Penerima Penghargaan, Pejabat eselon III, IV dan JP (Pusat).

Selain itu, Rakernas 2020 dijadwalkan pula akan dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dewan Pengawas BPIP, Deputi BPIP, Sekretaris Utama BPIP, Anggota BPIP, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. (mga/Kemenag)

Sumber : <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2020/01/28/17149/-p-usung-tema-moderasi-beragama-kemenag-gelar-rakernas-2020-besok-nbsp-p-.html>





## Fachrul Jamin Tak Ada Korupsi di Lingkungan Kemenag

**Indonesiainside.id, Jakarta** – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) silaturahmi lembaga ke berbagai kementerian atau lembaga. Salah satunya, KPK mengunjungi Kementerian Agama.

Dalam pertemuan tersebut, KPK memberikan masukan kepada jajaran Kemenag, terutama dalam aspek pencegahan. Seperti langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya korupsi.

“Masukan itu sangat bermanfaat untuk kami, apalagi tadi jajaran Kementerian Agama relatif lengkap. Jadi, bisa diserap oleh semua teman-teman dan akan dikembangkan ke bawah,” kata Menteri Agama Fachrul Razi di kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (28/1).

Fachrul menyatakan, pengawasan adalah fungsi penting dalam manajemen, di mana terkenal dengan konsep planning, organizing, actuating, and controlling (POAC). Karenanya, Kemenag, ujar dia, bertekad untuk terus bekerja lebih baik tanpa ada korupsi.

“Jadi, ini sudah bagian dari organisasi sampai tingkat kementerian. Dimana fungsi pengawasan ada di Dirjen dan paling atasnya ada KPK, karena KPK juga melakukan fungsi pengawasan di tingkat berbeda,” jelasnya.

Senada, pada kesempatan sama, Ketua KPK Firli Bahauri menyatakan, kedatangan lembaga anti rasuah ini dalam rangka memberikan dukungan dalam melakukan upaya dan program pencegahan korupsi. “Karena pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Firli menyatakan, pengawasan di tingkat kementerian dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Menurut dia, aparat tersebut harus diperkuat karena di antara agenda ke depan adalah penguatan pengawasan, baik itu aparat internal pemerintah maupun inspektorat.

“(Aparat pengawas) kementerian dan lembaga itu harus kita kembangkan dan perkuat, sehingga mereka bisa berinisiatif untuk melakukan pencegahan korupsi,” katanya.

Ketika ditanya wartawan, apakah KPK menjamin di Kemenag bakal ada korupsi atau tidak, dia tak dapat menjawab secara eksplisit. Sebab, semangat KPK lebih kepada pencegahan.

“Contoh di musim hujan banyak penyakit menular, ada malaria, tentu kita mencegahnya dengan tidak hanya nunggu di rumah sakit, tapi mari kita bersihkan lingkungan kita untuk tempat bersarangnya nyamuk,” kata dia mencontohkan.

Namun hal itu juga kembali kepada kementerian terkait. Terlebih Menteri Agama komitmen berupaya seoptimal mungkin agar tidak terjadi korupsi di lingkungan Kemenag.

“Kalau masih ada, tentu kita lakukan penegakan hukum,” ujarnya. (Aza)

Sumber : <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/01/28/fachrul-jamin-tak-ada-korupsi-di-lingkungan-kemenag>





## Pimpinan KPK Lanjutkan Safari ke Menag, Bahas Pencegahan Korupsi

**Jakarta** - Pimpinan KPK kembali melanjutkan safarinya dengan mendatangi Kementerian Agama (Kemenag). Pertemuan itu membahas pencegahan korupsi.

"Hari ini kita datang ke Kementerian Agama Republik Indonesia, ini adalah lembaga atau kementerian ke-12 yang kami kunjungi. Dalam rangka memberikan dukungan semangat supaya melakukan upaya-upaya, program-program untuk pencegahan korupsi itu yang pertama," ujar Firli usai pertemuan di Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Firli datang ditemani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata. Firli dan rombongan diterima oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Wamenag Zainut Tauhid beserta jajaran.

Firli menyebut pencegahan korupsi perlu dilakukan oleh seluruh pihak. Sedangkan penindakan akan dilakukan oleh KPK.

"Karena pencegahan korupsi tanggung jawab kita bersama, sementara penindakan itu urusan KPK, urusan penegak hukum," tuturnya.

Dia mengatakan, terdapat beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan untuk pencegahan korupsi. Di antaranya terkait pengawasan internal hingga proses pengadaan barang yang transparan.

"Penguatan aparat pengawas internal pemerintah, kedua membuka layanan untuk orang berani melapor apabila ada dugaan korupsi. Ketiga ingin memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa itu berjalan dengan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Firli.

Sementara, Menag Fachrul Razi mengatakan masukan yang diberikan KPK akan menjadi pegangan bagi Kemenag. Terlebih, dia menuturkan, pihaknya memiliki semangat yang sama dalam pencegahan korupsi.

"Beliau memberikan masukan masukan pada kita, apa langkah-langkah yang baik dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Itu sangat manfaat untuk kami, karena masukan itu menjadi pegangan kami bersama," ujar Fachrul.

"Kami juga sudah punya tekad yang sama, tapi dengan masukan KPK akan membuat kami kerja lebih baik, dalam upaya bekerja sebaik-baiknya tanpa ada korupsi," sambungnya.

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-4876764/pimpinan-kpk-lanjutkan-safari-ke-menag-bahas-pencegahan-korupsi>





## **Menag: Aceh Sudah Miliki Qanun Syariat Islam, Boleh Mazhab Lain Selain Mazhab Syafi'i**

**Hidayatullah.com**— Menteri Agama Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi menanggapi Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terkait pengajian agama.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Plt Gubernur Aceh menerbitkan SE Nomor 450/21770 tanggal 13 Desember 2019.

SE ini mengatur bahwa penyelenggaraan kajian/pengajian di Aceh mesti berdasarkan I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan Mazhab Syafi'iyah.

Menanggapi SE itu, Menag menilai bahwa Aceh sudah memiliki Qanun atau perda yang mengatur hal itu.

"Aceh sudah punya Perda atau Qanun. Di situ sudah ada aturan mengenai praktik pokok-pokok syariat Islam serta perlindungan dan pembinaan aqidah," ujar Menag Fachrul di Jakarta kemarin kutip website resmi Kementerian Agama pada Selasa (28/01/2020).

Menag kelahiran Aceh ini menjelaskan bahwa Aceh sudah memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Pasal 14 ayat 3, 4 dan 5 mengatur dibolehkannya pelaksanaan Syariat Islam oleh mazhab lain, selain mazhab Syafi'i.

Ayat 3 misalnya, mengatur bahwa "Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman di kalangan umat Islam."

Ayat 4 mengatur, "Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki, atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi'i".

Sementara ayat (5) menjelaskan, "Dalam hal kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits serta diakui secara sah oleh negara tetap dibenarkan/dilindungi."

Mantan Wakil Panglima TNI ini pun menjelaskan bahwa Aceh juga sudah punya Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

"Pasal 7 yang mengatur larangan antara lain menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat atau sengaja menghina atau melecehkan aqidah," ujarnya.

Terkait itu, Kemenag mengimbau semua pihak untuk turut menjaga kerukunan sesuai kultur masyarakat, termasuk di Aceh yang cinta perdamaian dan persatuan.

Menag mengaku bahwa mencabut SE bukan menjadi kewenangan Kemenag. Menag akan mendiskusikan hal ini dengan Kemendagri sebagai instansi pembina Pemerintah Provinsi.

Di sisi lain ia menganggap SE itu dikeluarkan dengan niat baik menanggulangi penyebaran ideologi atau mazhab yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Aceh

"Inisiatif pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di wilayahnya patut diapresiasi. Pijakannya tentu regulasi," sebutnya.\*

Sumber : <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/01/28/177006/menag-aceh-sudah-miliki-qanun-syariat-islam-boleh-mazhab-lain-selain-mazhab-syafii.html>



## Kapuskes Bakal Coret Petugas Terpapar Paham Radikal

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kesehatan Haji Eka Jusup Singka memastikan tidak segan mencoret petugas kesehatan yang terpapar paham radikal. Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Kesehatan Haji 1441 H/ 2020 M, yang digelar, Selasa (28/1). "Para pelamar yang terpapar radikalisme akan dicoret," katanya di hadapan para peserta diskusi.

Eka memastikan seleksi tahun ini lebih ketat dibandingkan dengan seleksi tahun-tahun sebelumnya. Karena Kementerian Kesehatan tahun ini melihat sejauh mana petugas kesehatan cinta terhadap NKRI dan nilai-nilai Pancasila serta jauh dari paham radikalisme.

"Di samping kriteria kompetensi dan pengalaman kerja, isu penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (Napza), dan penyebaran paham radikalisme turut menjadi perhatian panitia seleksi rekrutmen Petugas Kesehatan Haji," katanya.

Eka menuturkan, tahapan rekrutmen telah dimulai sejak Desember 2019 yang dilakukan secara online. Tercatat sudah 14 ribu orang yang mendaftar dan yang lolos akan menempati formasi sebagai Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 1.587 orang dan PPIH sebanyak 306 orang. "Proses seleksi petugas Kesehatan Haji tahun ini lebih ketat ketimbang sebelumnya," katanya.

Selain itu, Eka juga mengingatkan kepada petugas Kesehatan Haji agar lebih memperhatikan kondisi Kesehatan Jamaah Haji. Mengingat profil jamaah haji tahun 2020 sebanyak 60 persen adalah jamaah haji yang mempunyai risiko tinggi (risti), baik risti usia maupun risti penyakit.

"Sehingga petugas Kesehatan Haji harus lebih peka dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap jamaah haji," katanya.

Sumber : <https://ihram.co.id/berita/q4tsvy384/kapuskesbakalcoretpetugasterpaparpahamradikal>

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the website ihram.co.id. The article title is "Kapuskes Bakal Coret Petugas Terpapar Paham Radikal". The date is "Selasa, 28 Jan 2020, 23:38 WIB" and the reporter is "Ali Yusuf" with editor "Andi Nur Aminah". The article features a video player showing a man speaking, with the "REPUBLICA.CO.ID" logo overlaid. To the right of the main article, there is a "BERITA TERKINI" section with several news items: "KSAU: TNI AU Siap Dikerahkan untuk Evakuasi WNI di Wuhan", "Dubes Palestina: Rencana Perdamaian Trump tidak Adil", "Gojek Investasi ke Startup Produsen Helm Bluetooth! Helm Bang Gojek Jadi Baru Dong?", and "Pemerintah Sebut Draf Cipta Lapangan Kerja Rampung". The browser's address bar shows the URL: https://ihram.co.id/berita/q4tsvy384/kapuskesbakalcoretpetugasterpaparpahamradikal. The system tray at the bottom shows the time as 09:13 on 1/30/2020.



## Kemenag Disarankan Berangkatkan 2 Persen Calhaj Lansia

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Haji dan umrah Ade Marfuddin menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memberangkatkan para calon jamaah haji (calhaj) dari kalangan lanjut usia (lansia). Dia mengusulkan sebanyak dua persen porsi untuk calhaj lansia pada tahun ini.

Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia ini juga mengingatkan agar mereka didampingi pihak keluarga. Sebagai catatan, pada penyelenggaraan haji tahun lalu, cukup banyak jamaah lansia yang wafat di Tanah Suci.

"Untuk itu (calhaj lansia) harus didampingi dengan baik oleh pihak keluarga dari awal harus sudah disampaikan (disosialisasikan dan disiapkan)," kata Ade kepada *Republika*, Selasa (28/1).

Dia mengaku khawatir bila penanganan calhaj lansia selama di Tanah Suci hanya diserahkan kepada pihak petugas haji. Sebab, lanjut dia, pendampingan demikian dirasa kurang maksimal kalau dibandingkan dengan yang dilakukan pihak keluarga sendiri.

Untuk itu, menurut Ade, kehadiran pendampingan bagi calhaj lansia menjadi sangat penting. Kalau memberangkatkan satu persen calhaj lansia, pendampingnya juga sebanyak satu persen.

"Artinya menjadi dua persen atau 1 persen calhaj lansia diberangkatkan tanpa pendamping dari pihak keluarga. Kita mohon bahwa yang lansia itu diberangkatkan dengan pendamping dari pihak keluarga, ini yang harus diprioritaskan," ujarnya.

Ade menegaskan, pendampingan calhaj lansia oleh pihak keluarga tahun ini perlu dimaksimalkan. Calhaj lansia memang harus menjadi perhatian petugas tapi tidak menjadi beban tambahan petugas. Untuk itu mereka harus didampingi oleh pihak keluarga yang paling mengerti kondisi calhaj lansia.

### Perlu terobosan

Seandainya Kemenag hanya memberangkatkan satu persen calhaj lansia, dia mengatakan, besaran itu terlalu sedikit. Oleh karena itu, dia menilai besaran dua persen sudah cukup akomodatif.

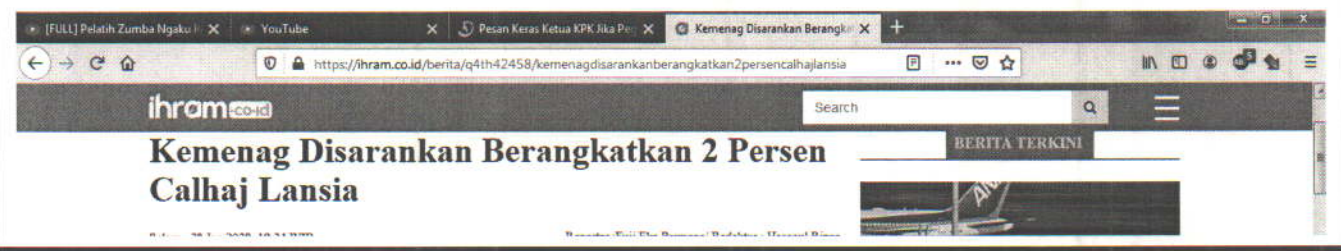
Sebelumnya, Kemenag menyampaikan jumlah calhaj lansia yang berusia 75 tahun ke atas ada sekitar 55.335 orang. Sebanyak satu persen calhaj lansia akan diberangkatkan tahun ini.

Calhaj lansia berusia 95 tahun ke atas yang masa tungguanya masih tiga tahun akan diberangkatkan semua. Kemudian diikuti dengan calhaj lansia berusia 85 tahun ke atas dan 75 tahun ke atas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia mengatakan, kebijakan memberangkatkan calhaj lansia bukan kebijakan baru. Pada tahun lalu, calhaj lansia--yakni mereka yang berusia di atas 70 tahun--pun diberangkatkan, meski sebatas yang sudah mendapat nomor porsi.

"Kalau yang diberangkatkan lima persen dari 55 ribu (calhaj lansia) itu kebijakan baru dan terobosan baru, (tapi kalau satu persen) ini melanjutkan kebijakan menteri sebelumnya, lansia diberangkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sumber : <https://ihram.co.id/berita/q4tsvy384/kemenagdisarankanberangkatkan2persencalhailansia>





## Serah Terima Jabatan KTU Madrasah Aliyah Negeri 7 dengan 18 Jakarta

JAKARTA, SPB - Serah terima Kepala Urusan Tata Usaha (KTU) MAN 11 dan kepada H Rehan selaku Kepala TU MAN 7 yang sebelumnya sugianta bertugas di MAN 7 dan H Rehan sebelumnya tugas di MAN 18 tersebut disaksikan sekaligus ditan-datangani oleh H Komarudin, selaku Kankemenag Kota Jakarta Selatan, beserta jajarannya, kepala madrasah (kamad), beserta guru dan karyawan turut menyaksikan acara tersebut.

H Komarudin memberikan arahan dan motivasinya, bahwa sebagai pejabat aparatur sipil negara harus siap ditempatkan dimana saja, rotasi bukan akhir dari segalanya, tetapi rotasi dari satu tempat ketempat yang lain gunanya untuk penyegaran, agar tidak terjadi kejenuhan didalam bekerja.

Pada intinya, kita harus banyak

banyak bersyukur, atas berkah dari Allah SWT, karena kita semua khususnya untuk Rehan dan Sugianta, yang telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan mandat untuk membantu kepala kepala sekolah untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan khususnya madrasah, bekerjalah dengan ikhlas, profesional dan tanggung jawab, dan berinovasi, untuk memajukan sekolah yang dikelolanya, jalin komunikasi yang baik, dengan guru dan karyawan.

Usai acara tersebut SPB mewancarai pejabat KTU yang baru saja duku-kuhkan, salah satunya Sugianta, terkait dengan tugas nya sebagai KTU MAN 11 yang baru, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada saya, dan saya sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang terkait, karena saya

ditugaskan masih di Jakarta Selatan.

Sebagai ASN saya siap ditempatkan dimana saja, mudah mudahan saya bisa menjalankan tugas saya ditempat yang baru dengan sebaik baiknya, segala kreativitas dan dan program yang baik bersama kepek akan saya bawa ketempat tugas saya yang baru, semoga, dengan ditempatkan dikota yang sama, ini sangat membantu sekali, dari segi kedisiplinan waktu sangat efisien sekali, kata Sugianta

Selama 5 tahun saya mengemban tugas di MAN 7 alhamdulillah saya merasakan kepuasan bathin, tidak ada kendala yang berarti, komonikasi dengan seluruh keluarga besar MAN 7 terjalin dengan sangat baik, kerja sama dalam meningkatkan mutu dalam segala aspek terkait kemajuan MAN 7 sungguh sangat luar biasa, kenang Sugianta .

Hal serupa disampaikan juga oleh H Rehan selaku KTU yang baru menggantikan KTU lama, disela sela usai acara, terkait penempatan saya yang sekarang, saya sangat bersyukur, karena dari segi jarak tempuh dan waktu sangat episien, mudah mudahan di tempat yang baru ini, keluarga besar MAN 7 bisa menerima saya, dan dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan MAN 7 kususny.

Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan program program kamad dan KTU yang sebelumnya, saya mohon dukungannya dari seluruh pihak terkait, agar saya bisa menjalankan tugas dengan sebaik baiknya sesuai fungsi saya sebagai KTU.

(Frans/Mariam)



## Ustazd Zainul Maarif Jabat Kepala MTsN 31 Jakarta



JAKARTA, SPB - Ustadz Zainul Maarif, walaupun baru dilantik sebagai Kepala Madrasah (Kamad) MTsN 31 Jakarta, beberapa waktu lalu, ternyata bukan bukan sosok baru di dunia pendidikan.

Sebelum pindah ke Jakarta Zainul Maarif aktif sebagai kepala asrama di sebuah sekolah menengah atas unggulan yang ada di Jawa Timur tahun 1999-2001 dan diangkat sebagai PNS tahun 2004.

Sebelum ditugaskan di MTsN 31, ia sebagai guru di MTsN 24, lalu pindah tugas di MTsN 31 dan aktif menangani Boarding School MTsN 31 bersama kamad lama.

Sebagai kepala madrasah yang baru, saat dimintai pendapatnya oleh wartawan media ini menyampaikan, atas pelantikan dirinya sebagai Kamad MTsN 31 Jakarta, ia sangat berterimakasih dengan pihak terkait yang telah mem-

berikan kepercayaannya untuk mengelola Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta.

"Saya akan mengelola dua pintu yaitu sekolah reguler dan boarding school yang ada MTsN 31, tentunya dari segi penanganan dan pengelolaannya untuk boarding school yang jelas sangat berbeda", katanya.

Ia menjelaskan, Boarding school perlu penanganan khusus terutama dari segi penanganan siswa dan pendampingannya lebih extra, terhadap siswa maupun tenaga pengajarnya, kurang lebih sepuluh tahun berkecimpung langsung untuk mengelola boarding school bersama kamad.

"Dengan adanya tugas saya yang baru sebagai Kepala Madrasah (kamad) MTsN 31 yang baru, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meneruskan program yang baik yang sudah ada, dan akan memberikan terobosan terobosan baru yang lebih inovatif, terkait dengan kemajuan dalam segala aspek, tentunya saya perlu dukungan dari semua pihak, sesuai moto madrasah, madrasah hebat, Madrasah-bermartabat", terangnya.

(Frans/Mariam)



## **Pesan Keras Ketua KPK Jika Pegawai Kemenag Nekat Korupsi**

**Dream** - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri kembali melakukan safari kerja. Kali ini, Firli berkunjung ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk bertemu Menteri Agama, Fachrul Razi.

" Sore ini kami mendapat kehormatan dikunjungi oleh ketua KPK bersama jajaran beliau dan sangat banyak memberikan masukan kepada jajaran Kementerian Agama," ujar Fachrul di kantornya, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

Fachrul mengatakan, pertemuan itu membahas cara-cara pencegahan korupsi di lingkungan kementerian. Dia berharap, jajaran Kemenag dapat senantiasa menjaga integritas dari perilaku korupsi.

" Tadi jajaran Kementerian Agama relatif lengkap, jadi bisa diserap oleh semua teman-teman dan akan dikembangkan ke bawah," ucap dia.

### **Janji Lakukan Penegakan Hukum**

Di lokasi yang sama, Firli menegaskan pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya berada di KPK saja.

" Kementerian membuat sistem manajemen anti suap, anti korupsi," kata Firli.

Meski setiap kementerian sudah memiliki lembaga internal di bawah inspektorat, pengawasan terhadap penyimpangan masih perlu diperkuat.

" Tentu ini harus diperkuat. Karena beberapa agenda perubahan salah satunya adalah penguatan pengawasan baik, itu aparat internal pemerintah mau pun inspektorat," ucap dia.

Firli meyakini Menteri Agama Fachrul Razi memiliki komitmen yang kuat dalam hal pencegahan korupsi. Meski demikian, secara tegas Firli memastikan akan menindak secara hukum apabila ada tindakan korupsi di Kemenag.

" Pak menteri sudah komitmen segala upaya agar tak terjadi korupsi, kalau masih ada kita lakukan penegakan hukum," kata dia.

### **Kemenag Bangun Studio dan Prototipe Pesawat di Asrama Haji**

**Dream** - Kementerian Agama (Kemenag) berencana meningkatkan fasilitas di asrama haji untuk menunjang kenyamanan para jemaah. Untuk tahun ini, fasilitas asrama haji yang akan ditingkatkan yaitu di Gorontalo.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, mengatakan fasilitas yang akan dibangun yakni *mock up* pesawat hingga studio film.

" Kami juga akan bangun studio film di beberapa asrama haji," ujar Muhajirin dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu, 22 Januari 2020.

Studio film itu nantinya menayangkan tata cara manasik haji dalam format video. Sehingga, calon jemaah lebih mudah paham mengenai tahapan pelaksanaan ibadah haji melalui pembelajaran visual.

Saat ini, fasilitas studio film sudah dibangun di Asrama Haji Yogyakarta.

" Pembangunan studio untuk manasik ini sebagai sarana penyampaian materi secara audio visual. Setelah itu, jemaah haji melakukan praktek langsung di lapangan," ucap dia.

Sumber : <https://www.dream.co.id/news/ketua-kpk-beri-masukan-anti-korupsi-ke-menteri-agama-2001280.html>





# LPPOM MUI Canangkan Visi-Misi Baru

**P**EMBERLAKUAN Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi era baru pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Jika sebelumnya sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*), maka sejak diundangkannya UUJPH pada 27 Oktober 2019 lalu sertifikasi halal di Indonesia menjadi bersifat wajib (*mandatory*).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi para pemangku kepentingan di bidang halal. Bagi pemerintah, UU tersebut merupakan upaya perlindungan sekaligus jaminan bagi konsumen muslim agar mendapatkan produk yang jelas kehalalannya. Oleh karena itu pengadministrasian sertifikasi halal ditangani oleh pemerintah.

Karena bersifat wajib, maka pembiayaan sertifikasi halal pun menjadi tanggung jawab

pemerintah. Saat ini tengah digodok skema pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), agar mereka dapat terus berkembang. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), berdasarkan pasal 33 UU JPH, berperan sebagai lembaga pemberi fatwa seperti yang selama ini sudah dilakukan.

Ketentuan wajib halal ini akan berdampak pada semakin banyaknya pelaku usaha yang akan mengurus sertifikasi halal. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 UU JPH, kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagai antisipasi terhadap era baru sertifikasi halal di Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai LPH telah memantapkan visi dan misi baru. (*lihat boks: Visi Misi Baru LPPOM MUI*).

Direktur Operasional LPPOM MUI, Ir. Sumunar Jati

menegaskan, pencanangan visi misi baru tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen di bidang halal. Selain visi misi, LPPOM MUI juga meneguhkan komitmennya yang dituangkan dalam nilai-nilai LPPOM MUI, yakni **Integritas, Profesional, Sinergi, Inovasi dan Pelayanan Prima**. "Era baru sertifikasi halal di Indonesia menuntut LPPOM MUI untuk terus berbenah guna meningkatkan pelayanannya," ujar

Sumunar Jati.

Sejak pertama kali berdiri pada 6 Januari 1989, LPPOM MUI terus-menerus melakukan penataan organisasi, modernisasi pelayanan dan meningkatkan kompetensi karyawan. Selain memberikan *leadership* dan *customer service training*, seluruh jajaran LPPOM MUI juga ditekankan tentang pentingnya komitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta program lain di bidang pengembangan ketrampilan dan kompetensi sumber daya manusia.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), LPPOM MUI yang didukung oleh lebih dari 1.0100 orang *auditor* (pusat maupun daerah), telah melakukan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang halal. Sedangkan dari sisi infrastruktur, telah dikembangkan berbagai program

## VISI dan Misi Baru LPPOM MUI

**Visi :** Terdepan dalam Solusi Jaminan Halal

**Misi :**

1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal yang handal, mudah, cepat, dan transparan;
2. Mengembangkan standar sertifikasi halal yang dapat diterima dan menjadi acuan utama bagi komunitas halal nasional dan internasional;
3. Memberikan edukasi dan promosi halal kepada pelaku usaha dan seluruh masyarakat;
4. Menyediakan data dan informasi halal terlengkap dan terpercaya;
5. Mendapatkan, menjaga, dan mengembangkan talenta terbaik dalam lingkungan kerja yang harmonis;
6. Menyediakan infrastruktur pendukung operasional berbasis teknologi modern;
7. Memperluas dan memperkuat hubungan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.





DOK LPPOM MUI

Tim Manajemen usai perumusan visi-misi baru LPPOM MUI

layanan yang kesemuanya bermuara pada kepuasan masyarakat, baik produsen maupun masyarakat sebagai konsumen produk halal.

Layanan terbaru LPPOM MUI yang diluncurkan pada awal 2019, antara lain Sertifikasi Halal *Online* (CEROL-SS23000) versi 3.0 yang memberikan pengalaman baru pendaftaran sertifikat halal.

Layanan ini membuat pendaftaran sertifikasi halal lebih mudah digunakan, lebih cepat, lebih aman dengan fitur yang responsif, dilengkapi menu tabulasi, *pop up form*, penjadwalan dan *monitoring real time*.

Layanan lainnya adalah aplikasi HalalMUI versi 3.0 dengan fitur baru serta menu baru dan beragam *update* informasi terkait halal. Selain itu, ada juga layanan *Quick Response (QR) Code* Halal Resto versi 2.0, *online payment* LPPOM MUI provinsi untuk UMKM, serta peluncuran buku seri HAS 23000. LPPOM MUI meluncurkan berbagai aplikasi berbasis teknologi agar dapat memudahkan para konsumen mengakses informasi dan pelayanan sertifikasi halal.

Sumunar Jati menegaskan, LPPOM MUI harus bisa mengi-

kuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat, agar cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut LPPOM MUI tentu tak bisa bekerja sendiri. "Era baru pengembangan halal di Indonesia harus menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan", tegasnya.

Ketua Dewan Pengawas LPPOM MUI Prof. Dr. Tun Tedja Irawadi mengapresiasi inisiatif LPPOM MUI dalam menyongsong perubahan di bidang sertifikasi halal di Indonesia. "Dengan pemberlakuan UU JPH oleh pemerintah, kita mengharapkan LPPOM MUI dapat lebih berperan lagi dalam aspek halal yang sangat dibutuhkan umat, di kancah nasional maupun internasional," ujarnya. (\*\*\*)



# Sokong Pluralisme dari Akar Rumput

*Bukan hanya di Indonesia, di tingkat global juga terlihat hubungan yang memburuk di antara pemeluk Islam, Kristen, dan Yahudi.*

INDRIYANI ASTUTI  
indriyani@mediaindonesia.com

**M**ELEMAHNYA hubungan saling menghormati antarpemeluk agama menjadi pemicu timbulnya ketegangan di masyarakat. Warga di akar rumput perlu kembali diajarkan untuk saling mengenal komunitas beragama dan cara hidup masing-masing.

Untuk itu, pendiri Foreign Policy of Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menginisiasi program 1.000 Abrahamic Circles atau Seribu Lingkaran Ibrahim yang menyasar akar rumput.

Anggota lingkaran itu mencakup tiga pemimpin atau tokoh agama dari Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama tersebut dipilih karena berasal dari satu ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim.

Mereka akan tinggal bersama-sama selama tiga minggu di tiap lingkungan anggota lingkaran seperti pesantren atau komunitas pendeta Kristen. Sejauh ini sudah ada tiga lingkaran yang dibentuk dari target 1.000 lingkaran.

Dino yang didampingi antara lain perwakilan dari Nahdlatul Ulama dan tokoh umat Katolik sekaligus budayawan Romo Magnis Suseno membeberkan kegiatan Seribu Lingkaran Ibrahim kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan bukan hanya di Indonesia, di tingkat global juga terlihat hubungan yang memburuk di antara pemeluk Islam, Kristen, dan Yahudi. Hal itu ditandai dengan

serangkaian kejadian teror yang menyasar rumah ibadah, di antaranya penembakan yang terjadi di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Maret 2019.

Lalu bom yang meledak di Gereja Santo Antonius di Sri Lanka pada 21 April 2019 bertepatan dengan misa Paskah serta bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) pada 2018.

Mengutip survei PEW Research Center pada 2016, Dino menyebut pembatasan kebebasan beragama meningkat, baik yang dilakukan pemerintah maupun kelompok masyarakat. Studi yang dilakukan di 198 negara itu menunjukkan muslim dibatasi dan diganggu di 142 negara.

Selain itu, penganut kristiani dibatasi kebebasan beragama dan diganggu di 144 negara. Adapun orang Yahudi mengalami perlakuan buruk serupa di 87 negara.

Menurut Dino, Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi program Seribu Lingkaran Ibrahim. Wapres, terang Dino, mengatakan Indonesia punya peran sangat strategis untuk menjalin kerukunan bukan hanya secara nasional, melainkan juga global.

## Kewajiban umat

Pada kesempatan yang sama, hadir pula Muhammad Nur Hayid dari Pesantren Al Anwar, Ploso, Pacitan, Jawa Timur. Peserta program Seribu Lingkaran Ibrahim itu menyampaikan, dari pengalaman hidup ber-

sama, dialog dan kesadaran untuk menciptakan kedamaian antarumat bergama dapat diwujudkan.

"Untuk membangun kesadaran bahwa *peace building* di masa mendatang tidak hanya menjadi kewajiban para pemimpin, tapi juga seluruh komponen umat," ujarnya.

Selama tiga pekan para anggota Lingkaran Ibrahim tinggal di komunitas agama berbeda. Di Indonesia, perwakilan dari umat Katolik Sri

Lanka, 'mondok' di NU Community di Lumajang, Jawa Timur. Mereka melihat keseharian santri dan Islam Nusantara dipraktikkan. Dengan begitu, anggapan mengenai islamofobia atau ketakutan berlebihan terhadap Islam dapat diluruskan.

Romo Magnis menilai sebisa mungkin program tersebut harus menyasar akar rumput. Dengan begitu, antarpemeluk agama bisa berkenalan, saling menghormati, saling menghargai, dan dapat bekerja sama sehingga bisa bersinergi. "Ini sesuatu yang cukup baru. Saya sangat mendukung," tuturnya. (P-2)



# BPIH 2020 akan Ditetapkan Hari Ini

● ALI YUSUF, FUJI E PERMANA

## Komnas Haji dan Umrah ingatkan tentang biaya riil penyelenggaraan haji.

JAKARTA – Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020 akan diumumkan pada hari ini, Rabu (29/1). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ace Hasan Syadzily kemarin. Dia mengatakan, BPIH 2020 diputuskan setelah pihak legislatif selesai meninjau seluruh komponen penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Berbagai aspek sudah ditelaah DPR-RI, termasuk *katering*, pemondokan, dan transportasi untuk jamaah haji Indonesia.

"Kita nanti tanggal 29 (Januari 2020), insya Allah, akan memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020," ujar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi *Republika*, Selasa (28/1).

Menurut dia, penetapan BPIH 2020 lebih baik dilakukan seawal mungkin pada tahun ini.

Dengan begitu, pihaknya berharap, masyarakat yang telah mendapatkan porsi keberangkatan pada musim haji tahun ini dapat lebih leluasa dalam menyiapkan pelunasan BPIH mereka.

"Jadi, kita sengaja tetapkan lebih awal agar jamaah haji kita yang tahun ini diberangkatkan bisa menyediakan uang yang harus mereka lunasi," ucap politikus Partai Golkar itu.

Ace menjelaskan, Komisi VIII DPR-RI pada hari ini tak hanya mengagendakan penetapan BPIH 2020, tetapi juga berbagai standar pelayanan untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Standar itu sudah sepatutnya menjadi acuan bagi pemerintah, termasuk Kement-

rian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku pemangku kepentingan urusan haji.

Pada awal pekan ini rombongan anggota DPR-RI telah mengunjungi Arab Saudi untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, lanjut Ace, secara umum semua komponen pelayanan dalam kondisi baik.

"Tidak hanya *katering*, tetapi hotel juga kita tinjau dan harus sesuai standar, minimal bintang tiga. Meski demikian, ada satu

komponen untuk pemondokan berdasarkan *tasreeh* pihak Arab Saudi, satu kamar diisi lima orang. Tetapi, menurut kami, itu hanya (kapasitas) untuk empat orang," ujar dia.

*Tasreeh* yang dimaksud adalah proses pengecekan yang dilakukan pihak Pemerintah Arab Saudi terhadap komponen penyelenggaraan ibadah haji melalui muasasah.

### Biaya riil

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, penetapan BPIH harus adil terhadap calon jamaah haji, baik yang dijadwalkan berangkat pada tahun ini maupun yang masih menunggu giliran. Dia mengingatkan, biaya riil penyelenggaraan ibadah haji bagi tiap orang sudah mencapai Rp 70 juta pada tahun lalu.

Bila BPIH dipatok sebesar Rp 35,2 juta seperti pada tahun lalu, sisanya diperoleh dari investasi dan subsidi nilai manfaat. Oleh karena itu, menurut Mustolih, besaran BPIH yang terlalu jauh dari biaya riil patut diwaspadai. Apalagi, pemerintah juga mesti mempertimbangkan angka inflasi serta tren kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang (*avtur*) dan hotel.

"Yang dikhawatirkan ketika

pemerintah tidak menaikkan BPIH, berarti biaya subsidi yang diberikan dari calon jamaah haji tunggu (kepada calon jamaah haji yang berangkat—Red) akan tergerus," ujar Mustolih kepada *Republika*, Selasa (28/1).

Dia mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kemenag, dan DPR-RI sudah sewajarnya berkeinginan untuk menyenangkan calon jamaah haji melalui kebijakan yang tidak menaikkan besaran BPIH. Akan tetapi, pihaknya meminta adanya pertimbangan yang tepat, khususnya bagi calon jamaah yang masih menunggu giliran keberangkatan ke Tanah Suci.

"Artinya, dana jamaah haji yang disimpan di sukuk dan instrumen investasi lainnya yang mestinya hasilnya dikembalikan ke calon jamaah haji tunggu tersebut, jangan terlalu besar diberikan untuk subsidi calon jamaah haji yang berangkat tahun ini," ucap dia.

"Jadi, jangan sampai kemudian keputusan yang populis menjadi tidak baik dan menjadi masalah di masa yang akan datang. *Kan* haji ini berkelanjutan, setiap tahun, mungkin berlangsung selama-lamanya. Artinya, dalam waktu panjang," sambung Mustolih.

■ ed: hasanul rizqa